

UN dan Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah

Awaluddin Tjalla¹

Abstract

National test (UN) previously known as government test, the Ebtanas, and UAN is one of the summative evaluation to be done for the basic summary taking about the process of learning. The evaluation is done by the National test in national scale and can be seen as the responsibility of the school (teacher, headmaster, and policy maker) to stakeholders which one the parents and public out side.

Many research, evaluation, and facts in the field show that the National Test give significant donation in the progress of qualified learning at school and the prove can increase the quality of national education.

Keyword; National Test (UN), summative evaluation, qualified learning

Latar Belakang

Untuk mempersiapkan anak didik menghadapi tantangan di masa depan, pertama-tama pendidikan harus mengantisipasi dampak dan tuntutan globalisasi, yang akan menjadi ciri pokok abad XXI. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal dalam menghadapi era globalisasi. Dimensi yang dimaksud dalam hal ini adalah: (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi, dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis dan kecakapan praktis. Kesemuanya ini bermuara pada bagaimana menyiapkan anak didik untuk mampu menjalankan kehidupan (*preparing children for life*), dan bukan sekedar mempersiapkan anak didik untuk menjadi manusia yang hanya mampu menjalankan hidupnya.

Paradigma pembangunan pendidikan nasional menempatkan anak didik pada kedudukan yang sangat sentral. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan dalam hal ini menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu. Pendidikan dalam hal ini bertujuan membantu anak didik untuk dapat memuliakan hidup (*ennobling life*). Akan tetapi, di tingkat praksis, permasalahan pendidikan yang terjadi memperlihatkan kendala-kendala yang menghambat tercapainya tujuan pendidikan seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing menjadi salah satu penyebab dari hal ini. Pendidikan yang memiliki kekuatan daya saing ditandai dengan mutu pembelajaran dalam program-program pendidikan yang amat dibutuhkan oleh masyarakat. Keunggulan dan daya saing pendidikan Indonesia yang dikaitkan dengan produktivitas tenaga kerja

lulusan pendidikan, Indonesia dalam hal ini berada pada posisi 12 dari 12 negara di Asia (PERC, 2001).

Dalam hal mutu, Salah satu sebab rendahnya mutu lulusan adalah belum efektifnya proses pembelajaran. Proses pembelajaran selama ini belum mengarah pada konteks pembelajaran bermakna, dan masih terlalu berorientasi terhadap penguasaan teori dan hafalan dalam semua bidang studi yang menyebabkan kemampuan belajar peserta didik menjadi terhambat. Metode pembelajaran yang terlalu berorientasi pada guru (*teacher oriented*) cenderung mengabaikan hak-hak dan kebutuhan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan kurang dioptimalkan. Rendahnya mutu hasil belajar ditandai oleh standar kelulusan yang ditetapkan, yaitu 5,50 dari skala 10. Ini berarti bahwa seseorang dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan mampu menyerap mata pelajaran hanya sebesar 50,5 %. Dengan standar kelulusan yang ditetapkan tersebut, masih banyak siswa yang tidak lulus. Hal ini ditandai dengan hasil Ujian Nasional tahun pelajaran 2009/2010 baik pada sekolah negeri maupun swasta pada ketiga mata pelajaran, pada tingkat SMA/MA ketidaklulusan sebesar 10,12%, SMK 11,18 %, dan SMP/MTs/SMP Terbuka 9,73 % (BSNP, 2010).

Apabila dilihat dari kompetisi mutu akademik antarbangsa, melalui *Programme for International Student Assessment (PISA)* 2003 menunjukkan bahwa dari 41 negara yang disurvei bagi siswa usia 15 tahun, untuk bidang IPA , Indonesia menempati peringkat ke 38, sementara untuk bidang Matematika dan Kemampuan Membaca menempati peringkat ke 39. Apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Korea, peringkatnya sangat jauh, untuk bidang IPA menempati peringkat ke 8, membaca peringkat ke 7 dan Matematika peringkat ke 3. Sedangkan pada PISA 2006 yang diikuti oleh 57 negara, prestasi siswa Indonesia dalam bidang IPA berada pada peringkat ke 50.

Studi lain seperti dalam *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*, yang merupakan seri pengujian berskala internasional yang paling mutakhir yang diselenggarakan di hampir 50 negara untuk mengukur kemajuan dalam pembelajaran Matematika dan Sains, dengan cara menyediakan data tentang prestasi siswa dalam kaitannya dengan kurikulum, praktik pengajaran, dan lingkungan sekolah yang berbeda-beda. Laporan hasil studi memperlihatkan masih rendahnya pencapaian prestasi siswa pada kedua bidang pembelajaran tersebut dibandingkan dengan Negara-negara peserta lainnya. Sebagai contoh, Indonesia berada pada peringkat 34 dari 38 negara peserta pada tahun 1999, dan pada tahun 2003, Indonesia tetap berada pada peringkat yang sama (ke 34) dari 45 negara peserta. Selanjutnya studi internasional dalam bidang membaca pada anak-anak kelas empat sekolah dasar/madrasah ibtidaiah di seluruh dunia (*Progress in International Reading Literacy Study*) atau studi PIRLS tahun 2006 yang diikuti 45 negara termasuk Indonesia, memperlihatkan prestasi anak Indonesia dalam bidang membaca berada pada peringkat ke 41.

Kajian tersebut sebelumnya, memperlihatkan bagaimana gambaran kualitas pembelajaran yang ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang juga sekaligus merupakan gambaran dari mutu pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah. Hasil analisis ini memperkuat lebih jauh hasil penelitian tentang kemampuan dasar siswa anak SD/MI sebelumnya yang memperlihatkan hasil memprihatinkan. Hasil penelitian Puspendik Balitbang Depdiknas tahun 2004, tentang kemampuan dasar siswa dalam hal keterampilan membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*) di 200 sekolah pada 13 kabupaten yang berada pada 7 (tujuh) provinsi di Indonesia memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa berada pada kategori belum kompeten (2004).

Berdasar acuan tersebut, dalam hubungannya dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, maka pentingnya UN (baik SD, maupun SLTP dan SMA/MA/SMK) yang

dilaksanakan saat ini berguna sebagai alat untuk memantau kualitas pendidikan di sekolah dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya pada jenjang pendidikan yang sama. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Mardapi (2000), bahwa hasil UN di satuan pendidikan SD berfungsi untuk; memantau kualitas pendidikan baik antar wilayah maupun antar waktu, memotivasi siswa, guru, sekolah agar lebih berprestasi, dan umpan balik bagi pengelola pendidikan. Selanjutnya Tilaar (2006), menyatakan bahwa kegiatan UN merupakan suatu kegiatan pemetaan masalah-masalah pendidikan nasional serta kesepakatan untuk menangani masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh sistem pendidikan nasional (Tilaar, 2006).

Pembahasan

Ujian Nasional

Ujian Nasional (UN) bagi satuan pendidikan SMP/MTs, dan SMA/MA yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasilnya digunakan sebagai: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan; (2) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dari perspektif legalitas, UN memberikan penjelasan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai amanat yang tertuang di dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang merupakan salah satu peraturan yang diamanatkan oleh UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU tentang Sisdiknas diundangkan sebagai pelaksanaan UUD 1945 pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Atas dasar acuan ini, penyelenggaraan Ujian Nasional merupakan pelaksanaan dari salah satu ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sedangkan dari perspektif akademik, pelaksanaan UN dan UASBN dapat dipandang sebagai suatu bentuk *assessment*, atau penilaian. Pelaksanaan penilaian secara umum ada tiga macam, yaitu penilaian dalam kelas, penilaian pada tingkat sekolah dan penilaian dalam skala nasional.

Penilaian dalam kelas mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Penilaian yang berfungsi formatif dilakukan untuk kepentingan perbaikan proses pembelajaran, dasar pengambilan kesimpulan tentang keberhasilan proses pembelajaran. Ini berarti bahwa penilaian sumatif dapat juga dipandang sebagai bentuk akuntabilitas guru kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), khususnya orang tua dan masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk nilai dan tertuang dalam buku raport atau bentuk-bentuk laporan pendidikan lainnya. Penilaian tingkat sekolah pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajar selama mengikuti pendidikan di sekolah. Penilaian pada tingkat sekolah ini pada umumnya berfungsi sumatif. Analog dengan penilaian-penilaian yang berfungsi sumatif ini adalah penilaian dalam skala nasional atau yang lebih dikenal dengan ujian nasional (UN). Penilaian yang dilakukan melalui UN ini dapat juga dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah (guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan) kepada *stakeholder*, yang didalamnya adalah orang tua dan masyarakat.

UN merupakan kegiatan penilaian hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional (Kepmendiknas, 2003). Sebagai tanda telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, siswa

diberikan surat tanda lulus dan ijazah. Surat tanda lulus adalah surat pernyataan yang diberikan kepada siswa yang dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan. Sedangkan ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan siswa telah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan.

Fungsi ujian nasional sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang yang lebih tinggi. Fungsi ujian nasional tidak berbeda dengan pendapat para ahli, Keeves (1994) misalnya menyatakan bahwa ujian akhir berfungsi untuk sertifikasi, seleksi, survei, dan pengendalian mutu pendidikan. Agar fungsi dapat berjalan sebagaimana mestinya, ujian akhir merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengartikan, dalam rangka mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran (Gronlund, 1985). Dengan demikian fungsi ujian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan tingkat pencapaian atau keberhasilan suatu program pengajaran (Nitko, 1996).

Beberapa alasan sehingga UN sangat diperlukan untuk dilaksanakan, yakni:

a. UN mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah

UN mendorong semua pihak yang terkait untuk bekerja lebih baik, karena khawatir dengan ketidaklulusan. Ujian yang dilakukan ini mendorong siswa tekun belajar, guru mengajar lebih baik, mendorong kepala sekolah untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap mutu pendidikan di sekolah, dan mendorong orang tua untuk memberikan perhatian terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Hal ini memberi dampak secara langsung terhadap pencapaian hasil belajar siswa dan terhadap mutu pendidikan di sekolah.

b. UN merupakan *entry point* untuk meningkatkan mutu SDM dan daya saing bangsa

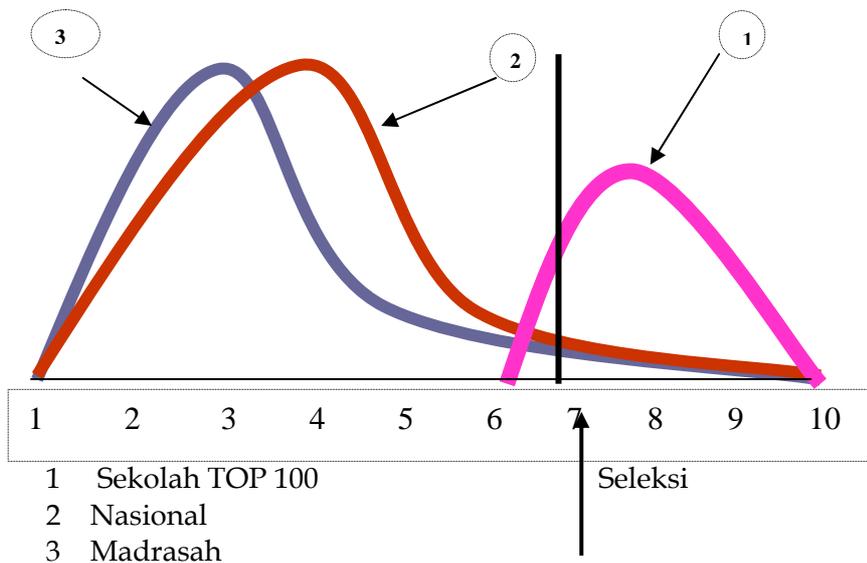
UN dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan tuntutan yang mendesak dan tidak dapat ditawar. Dalam era globalisasi saat ini, hanya masyarakat dan bangsa yang memiliki SDM bermutu yang akan memenangkan persaingan dalam pasar kerja dan pergaulan global. SDM yang bermutu hanya bisa diwujudkan dengan pendidikan bermutu. Dalam era globalisasi saat ini, SDM bermutu lebih menentukan kemajuan dan kemakmuran suatu masyarakat dari pada sumber daya alam.

c. UN merupakan instrumen untuk pemerataan mutu pendidikan

Dari perspektif pemerataan mutu pendidikan, UN dapat digunakan sebagai alat untuk memetakan mutu pendidikan, sekolah mana dan daerah mana yang sudah baik dan sekolah mana dan daerah mana yang belum baik mutu pendidikannya. Berdasarkan hasil UN dapat diketahui sekolah-sekolah serta daerah yang sudah baik dan yang masih kurang baik mutu pendidikan dilihat dari pencapaian standar kompetensi kelulusan secara nasional. Selanjutnya, pemerintah dapat membina dan membantu sekolah serta daerah secara proporsional dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh tanah air. Dengan demikian, pendidikan bermutu tidak hanya terdapat di kota-kota besar, dan tidak hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang yang ekonomi kuat, tetapi tersebar merata di seluruh tanah air, sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang.

d. Tidak adanya standar mutu pendidikan secara nasional

Dari perspektif sejarah, sejak Indonesia merdeka pernah diterapkan Ujian Negara yang sifatnya dan skalanya nasional, sampai dengan era awal tujuh-puluhan. Pada era Ujian Negara, ada suatu standar mutu pendidikan dalam skala nasional, mutu pendidikan Indonesia relatif baik, dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Pada waktu itu, Indonesia banyak mengirimkan tenaga guru ke luar negeri (misalnya ke Malaysia). Pada sisi lain, pemerintah Malaysia juga banyak mengirimkan mahasiswa untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya, mutu pendidikan Indonesia mulai merosot sejak diterapkan sistem Ujian Sekolah pada 1970-an. Pada era ini, sekolah membuat ujian akhir sendiri-sendiri, menyiapkan bahan ujian, dan menetapkan kelulusan sendiri. Tidak ada lagi standar nasional, yang ada adalah standar sekolah, sangat bervariasi, dan tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan.



Gambar 1. *Distribusi kemampuan lulusan pada awal pelaksanaan UAN*

Gambar 1, memperlihatkan bagaimana besarnya diskrepansi yang terjadi antar sekolah dilihat dari kualitasnya pada awal pelaksanaan UN. Distribusi skor rata-rata siswa pada sekolah TOP 100 lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah nasional yang umumnya dikelola pemerintah. Demikian pula halnya dengan madrasah yang umumnya rata-rata kemampuan lulusannya berada pada kategori sangat rendah.

Aspek yuridis penyelenggaraan UN mengacu pada: (1) mukaddimah UUD 1945; (2) UUD 1945 pasal 31 ayat (3); (3) UU nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal (11 ayat 1; 35 ayat 1; 57 ayat 1 dan 2; 58 ayat 2); (4) PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; ayat 1; (5) PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; pasal (72 ayat 1; 66 ayat 1; 68). Sedangkan dari perspektif teoritis penyelenggaraan ujian nasional mengacu pada perkembangan psikologis siswa-siswa dengan berdasar pada teori perkembangan kognitif dan intelektual dari Piaget (dalam Miller, 1993). Oleh karena itu, pemberian materi/bahan ujian serta tingkat kesulitan soal didasarkan pada tahapan perkembangan anak didik, baik pada tingkatan siswa-siswa yang berada pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah. Di samping itu dengan standar kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan yang ditetapkan, memberikan acuan mengenai materi ujian dalam

hubungannya dengan kriteria pencapaian tujuan pada setiap tahapan jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan karena keberhasilan suatu program pendidikan selalu dilihat dari pencapaian yang diperoleh dibandingkan dengan suatu kriteria. Oleh karena itu, salah satu pertanyaan penting menurut Reeves (2002), tentang pentingnya standarisasi pendidikan adalah bahwa standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan (*progress*). Ini berarti bahwa kualitas manusia suatu negara/bangsa dapat dilihat dari standar pendidikan yang dijadikan sebagai patokan/acuan pelaksanaannya.

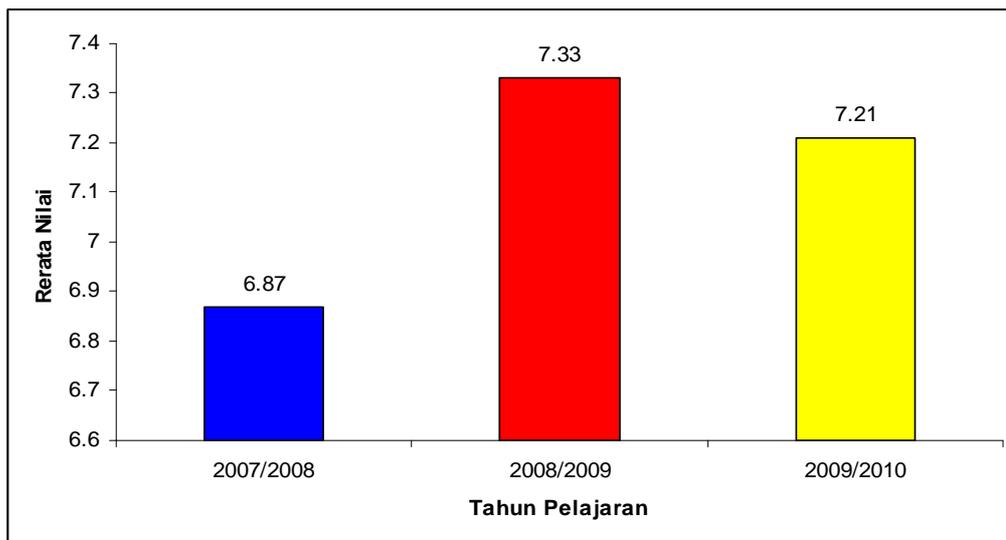
Astin (1993) dalam Mardapi dkk., (2000), menjelaskan bahwa standar akademik itu paling tidak memiliki dua arti. Pertama, standar akademik dapat diinterpretasikan sebagai tingkat penampilan siswa yang harus didemonstrasikan untuk memperoleh gelar atau derajat tertentu. Kedua, standar akademik dapat merupakan suatu proses perkembangan kecakapan itu sendiri.

Suatu kriteria harus ditetapkan lebih dahulu sebelum suatu program dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahan (*error*). Oleh karena itu dalam program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan selalu digunakan indikator-indikator yang menyatakan mutu pendidikan. Indikator tersebut dikembangkan dari suatu konsep yang operasional agar dapat ditelaah kesesuaian antara indikator dengan konsep yang operasional. Selain konsep, acuan baku sangat dibutuhkan untuk menetapkan kriteria keberhasilan satu program. Oleh karena itu acuan yang baku sangat dibutuhkan untuk memantau mutu pendidikan.

UN dan Mutu Pembelajaran

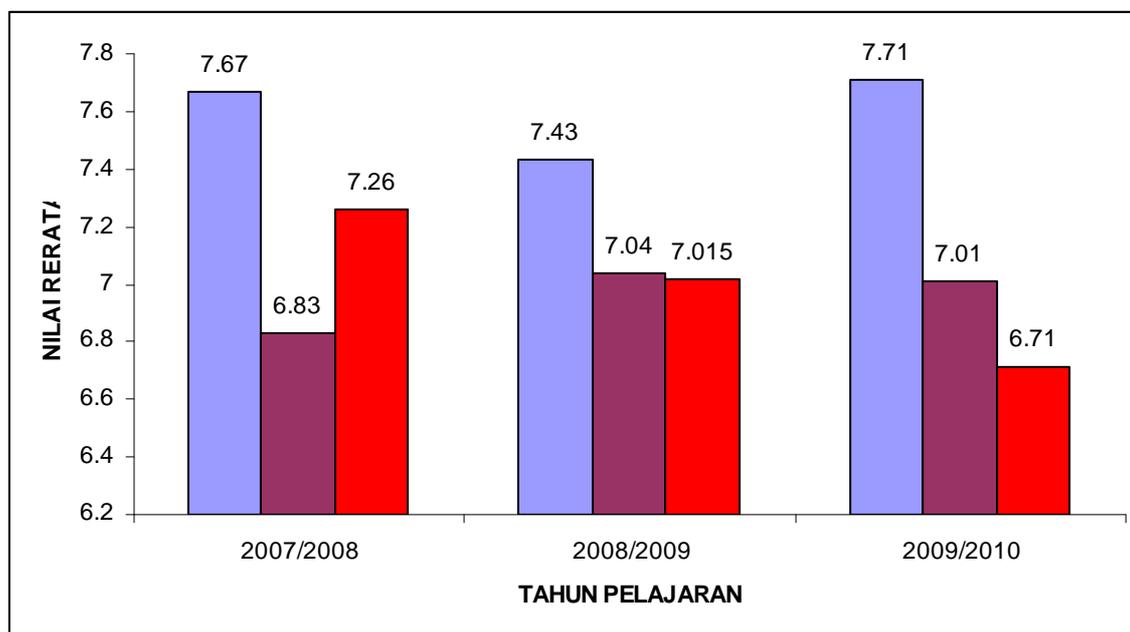
Hasil penelitian Mardapi (2000), menunjukkan bahwa hasil ujian nasional di pendidikan dasar berfungsi untuk; memantau kualitas pendidikan baik antar wilayah maupun antar waktu, memotivasi siswa, guru, sekolah agar lebih berprestasi, dan umpan balik bagi pengelola pendidikan. Selanjutnya, salah satu rekomendasi dari hasil kajian yang dilakukan oleh FIP UPI Bandung bahwa:” UAN merupakan strategi evaluasi yang potensial untuk mendorong peningkatan mutu lulusan dan motivator yang memaksa guru, siswa, dan penyelenggaraan pendidikan secara optimal.” Pada sisi lain, acuan ini mendukung pihak yang kontra terhadap UN yang menyatakan bahwa sebaiknya UN bukan sebagai ”veto” terhadap kelulusan, namun sebagai instrumen dalam memetakan mutu pendidikan.

Peningkatan persentase kelulusan, disparitas kelulusan yang menurun antar jenis sekolah, dan rerata nilai mata pelajaran dalam ujian nasional yang meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah secara nasional. Hal ini bukan saja ditandai dengan ditingkatkannya ambang batas rata-rata menjadi 4,50 juga adanya kebijakan satu kali ujian, dan tanpa ujian ulangan (Ali, 2007).



Gambar 2. Perbandingan rerata nilai UN SMP/MTs 2007/2008, 2008/2009, dan 2009/2010

Gambar 2, memperlihatkan bahwa rerata skor UN yang diperoleh terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada rerata UN SMP/MTs tahun 2008/2009 dibandingkan dengan rerata UN tahun 2007/2008, walaupun terlihat ada penurunan rerata skor UN pada tahun 2009/2010.



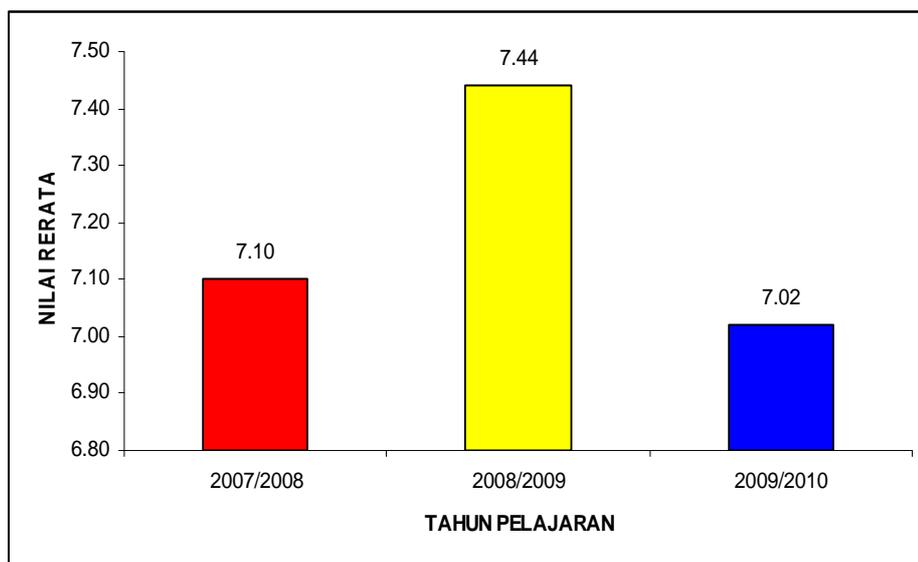
Gambar 3. Perbandingan rerata nilai UN SMA/MA (IPA, IPS, dan Bahasa) 2007/2008, 2008/2009, dan 2009/2010

Keterangan:

- rerata nilai untuk IPA
- rerata nilai untuk IPS
- rerata nilai untuk Bahasa

Hasil UN tahun 2007/2008 untuk jenjang SMA atau sederajat, angka kelulusan UN meningkat, dalam arti pencapaiannya naik dibandingkan dengan UN tahun sebelumnya (2006/2007). Padahal, angka standar kelulusan tahun ini juga lebih tinggi. Demikian pula halnya dengan . rerata UN untuk mata pelajaran IPS untuk tahun 2008/2009, meningkat dibandingkan dengan tahun 2007/2008. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2009/2010, rerata UN untuk mata pelajaran IPA lebih tinggi dibandingkan dengan tahun pelajaran 2007/2008 dan tahun pelajaran 2008/2009.

Pada sisi lain, peningkatan rerata UN untuk SMK, terlihat pada gambar bahwa untuk tahun pelajaran 2008/2009 rerata UN SMK meningkat dibandingkan dengan tahun pelajaran 2007/2008. Akan tetapi pada tahun 2009/2010, nilai rerata UN menurun dibandingkan dengan tahun 2008/2009.



Gambar 4. Perbandingan rerata nilai UN SMK 2008/2009, 2009/2009, dan 2009/2010

Hasil UN 2009/2010 untuk SMA/MA di daerah bencana seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Bali ternyata nilai rata-rata kelulusan yang diperoleh tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Untuk NAD nilai rerata kelulusan sebesar 7,32, Sumatera Utara 7,75, Sulawesi Utara 7,39, Jawa Timur 7,68, dan Bali 8,08. Secara khusus untuk Propinsi Bali Bali memperlihatkan *trend* kelulusan tinggi dalam lima tahun terakhir. Pada UN 2010, tingkat kelulusan di Bali untuk SMA/MA 96,60% dan SMP/MTs 98,67%, dan SMK 97,49%.

Angka kelulusan di Jabar untuk kelompok IPA berkisar 98,59%. Sedangkan rata-rata kelulusan tingkat nasional 93,90%. Sementara untuk kelompok IPS Jawa Barat mencapai kelulusan 96,09%, sedangkan tingkat nasional 87,47%. Bahkan di kelompok bahasa, Jabar berada pada posisi tinggi yaitu 94,88%, di atas nilai nasional yang hanya 83,28%. Selanjutnya untuk SMK, Jabar mencapai angka kelulusan 94,04%, sementara nasional 88,827%.

Dari berbagai hasil kajian tersebut memperlihatkan bahwa UN memberikan kontribusi bagi kegiatan pembelajaran di kelas, yang akhirnya tertuju pada peningkatan hasil belajar. Hal ini tercermin dari pencapaian persentase lulusan yang diperoleh dari tahun ke tahun, sejak dilaksanakannya UN. Hasil ini sesuai dengan hasil kajian tentang evaluasi penyelenggaraan UN, yang memperlihatkan bahwa siswa mempersepsikan positif terhadap kegiatan UN, dan akhirnya akan memberikan motivasi pada diri siswa (*intrinsic motivation*) untuk belajar dengan giat dalam mempersiapkan UN (Tola, 2007).

Penutup

Peningkatan persentase kelulusan, disparitas kelulusan yang menurun antar jenis sekolah, dan rerata nilai mata pelajaran dalam UN yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah secara nasional.

UN pada satuan pendidikan SMP/MTs, dan SMA/MA yang sudah dilaksanakan beberapa kali, secara yuridis dan konseptual perlu dilaksanakan. Berbagai kendala yang merupakan hambatan di lapangan perlu diupayakan untuk diperbaiki pelaksanaannya. Pentingnya kegiatan ini dilaksanakan karena terbukti memberikan kontribusi positif dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, dan juga akhirnya pada peningkatan mutu pendidikan.

UN sebagai suatu hal yang perlu dilakukan karena dapat digunakan sebagai: (1) alat ukur kualitas pendidikan antar daerah, (2) alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, (3) motivator bagi sekolah, kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad dkk. (2006). *Studi evaluasi penyelenggaraan UN*. Jakarta: Pusependik bekerjasama dengan UPI Bandung.
- Balitbang Diknas. (2007). *Panduan kebijakan pemanfaatan hasil UN untuk perbaikan mutu pendidikan*. Jakarta: Depdiknas Jakarta.
- Chan., dan Sam. (2005). *Kebijakan pendidikan era otonomi daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Depdiknas., RI. (2005). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia; Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Gronlund., dan Linn (1990). *Measurement and evaluation in teaching*. Sixth Edition. New York: Macmillan Publishing Company.
- Keeves, J.P. (1994). *National examinations: design, procedures and reporting*. Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning.
- Mardapi, Djemari., dkk. (2000). *Sistem ujian akhir dalam otonomi daerah*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Gonzales, E.J. dan Chrostowski, S.J. (2004). *TIMSS 2003 International science report: Finding from IEA's trends in international mathematics and science study at the fourth and eight grades*. Chetsnut Hill, MA: IEA.

- Miller, Patricia H. (1993). *Theories of developmental psychology*. Third Edition. New York: W.H. Freeman and Company.
- Mullis, Ina V.S., Martin, Michael O., Kennedy, Ann M., dan Foy, Fierre. (2007). *PIRLS 2006: International report*. Chetsnut Hill, MA: IEA.
- OECD. (2004). *Learning for tomorrows's world: First results from PISA 2003*. Paris Cedex 16: OECD.
- OECD. (2007). *PISATM 2006: Science competencies for tomorrow's world. Volume 1- Analysis*. Danvers, MA: OECD.
- Puspendik. (2004). *Laporan pengumpulan data baseline di sekolah dasar dan madrasah di 13 kabupaten*. Jakarta: Puspendik Balitbang Depdiknas.
- Reeves, Douglas B. (2000). *The leader's guide to standards*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Tardianto, Taufiq. (2006). *Kerangka dasar, struktur kurikulum; Standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI, SMP/MTs beserta peraturan pelaksanaannya*. Jakarta: CV. BP. Panca Bhakti.
- Tilaar., H.A.R. (2006). *Standarisasi pendidikan nasional*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Tola, Burhanuddin, dkk. (2007). *Evaluasi penyelenggaraan dan hasil UN 2006/2007*. Jakarta: Puspendik Balitbang Depdiknas.
- Tola, Burhanuddin. (2007). *Hasil studi internasional prestasi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan membaca*. Jakarta: Puspendik Balitbang Diknas.
- UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- OECD. (2004). *Learning for tomorrows's world: First results from PISA 2003*. Paris Cedex 16: OECD.